

BAB 2

PENGUTAMAAN KERJASAMA DALAM HUBUNGAN CINA-AS

Dalam bab ini akan disampaikan tentang komitmen pengutamaan kerjasama dalam hubungan Cina-AS, yang dalam realitanya dapat mengatasi perbedaan yang ada antara kedua negara. Selanjutnya, dalam bab ini secara garis besar akan digambarkan hubungan kerjasama antara Cina-AS, baik kerjasama melalui institusi-institusi internasional maupun kerjasama secara bilateral antara kedua negara. Untuk itu, penulis membagi paparan bab ini menjadi beberapa sub-bab dengan maksud agar memudahkan dalam memahami fenomena kerjasama dalam hubungan Cina-AS, yang substansinya disampaikan dalam uraian di bawah ini.

2.1 Signifikansi Kerjasama Cina-AS

Walaupun terdapat beberapa perbedaan pandangan dalam hubungan Cina-AS sebagaimana disampaikan sebelumnya, kedua negara menyadari bahwa mereka akan dapat mengatasi perbedaan-perbedaan melalui pengutamaan kesamaan-kesamaan di antara kedua negara. Hal ini nampak setelah terjadinya tragedi WTC, yang telah merubah pola hubungan AS dengan negara-negara lain, termasuk cara pandang terhadap AS Cina. Di sela-sela Konferensi APEC di Shanghai pada tahun 2001, Presiden Bush mengadakan pertemuan dengan Presiden Jiang Zemin dan membuat kesepakatan untuk melakukan kerjasama yang konstruktif. Pada tahun 2003, Presiden Hu Jintao dan Presiden Bush telah mengadakan dua pertemuan penting dan mencapai kesepakatan untuk melakukan kerjasama dalam bidang-bidang yang luas dan penting, demikian juga dengan kunjungan Perdana Menteri Wen Jiabao, yang berhasil menyepakati untuk meningkatkan dialog, memperluas konsensus, mengenyampingkan hal-hal yang menyebabkan perselisihan dengan meningkatkan kerjasama, serta meningkatkan komitmen untuk mengembangkan persahabatan mengingat gambaran dan keadaan dunia saat ini sudah jauh berubah.⁶² Hal tersebut mendorong munculnya pemikiran yang konstruktif dalam melihat hubungan Cina-AS sebagai berikut.

⁶² Zhou Wenzhong, *Foreign Affair Journal*, No. 70, Desember 2003.

Pertama, meskipun terdapat banyak perbedaan antara Cina dan AS, kedua negara juga banyak memiliki persamaan kepentingan dan memiliki landasan yang luas dan kuat untuk mengembangkan kerjasama. Sejak berakhirnya Perang Dingin menunjukkan bahwa masalah-masalah yang menyangkut kepentingan bersama antara Cina-AS semakin meningkat dan bidang garapan untuk mengembangkan dan memperluas kerjasama makin meluas. *Kedua*, sangat penting bagi Cina dan AS untuk berpikir dalam jangka panjang dan melihat hubungan kedua negara dengan gambaran yang lebih luas karena Cina dan AS merupakan aktor penting dan mempunyai pengaruh kuat dalam percaturan internasional, sehingga harus memikul tanggung jawab yang besar untuk ikut menciptakan dunia yang damai serta pembangunan umat manusia. Hubungan Cina-AS yang dapat terjalin dengan baik tidak hanya memberikan manfaat kepada kedua negara, tetapi dapat pula memberikan sumbangan kepada pembangunan, perdamaian, dan stabilitas dunia internasional.⁶³

Para pemimpin kedua negara sering mengatakan bahwa hubungan Cina-AS tidak murni merupakan hubungan bilateral semata karena pengaruhnya jauh di luar batasan bilateral, sehingga kedua negara dalam merumuskan hubungan bilateral tidak terpaku pada batasan-batasan isu bilateral tetapi harus dalam gambaran lebih luas yang memiliki implikasi regional maupun internasional. *Ketiga*, Cina dan AS berkomitmen untuk mengembangkan sikap yang konstruktif dengan mengedepankan prinsip-prinsip saling menguntungkan dan mendapat manfaat bersama. Seiring perubahan waktu, dimensi-dimensi baru selalu muncul dan memberi warna dalam hubungan Cina-AS. Dalam dunia saat ini, di dalam proses globalisasi yang semakin cepat, saling ketergantungan antara Cina-AS semakin dalam, dan isu-isu global semakin mengemuka dan semakin nyata. Hubungan antar kedua negara tidak lagi didasarkan kepada rumusan *zero sum game*. Hubungan yang harmonis akan memberi manfaat, sedangkan pertentangan tidak akan pernah menguntungkan siapapun.⁶⁴ Bagi Cina, penting untuk membina hubungan baik dengan AS dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut.

⁶³ *Loc.cit.*

⁶⁴ *Loc.cit.*

Pertama, hubungan baik dengan AS akan meningkatkan keyakinan terhadap terpeliharanya stabilitas dan perdamaian dunia. Kondisi ini diperlukan agar Cina dapat memusatkan perhatian kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi untuk menopang modernisasi Cina. *Kedua*, sejalan dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi Cina, AS merupakan pasar besar bagi barang-barang produk Cina. Selain itu, AS juga dapat merupakan sumber modal, teknologi, manajemen untuk menutup kekurangan Cina dalam mewujudkan Cina modern dan kuat. *Ketiga*, kebijakan AS terhadap Cina dan Taiwan diharapkan dapat memberikan dampak langsung terhadap perwujudan reunifikasi Cina-Taiwan secara damai. Untuk hal-hal tersebut di atas, *grand strategy* yang dirancang Cina harus dapat menciptakan peluang yang kondusif dalam melakukan pendekatan untuk membina hubungan baik dengan AS. Strategi Cina untuk mengembangkan kemitraan strategis (*strategic partnership*) dengan AS adalah upaya untuk mewujudkan komitmen kerjasama hubungan Cina-AS saat ini dan masa mendatang.⁶⁵

2.2 Kerjasama Cina-AS pada Institusi Internasional

2.2.1 Institusi Global

Kerjasama ekonomi dan perdagangan internasional antara Cina-AS dilakukan dalam rangka WTO. WTO adalah merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Sistem perdagangan WTO diatur melalui suatu persetujuan yang telah disepakati oleh negara-negara anggotanya.⁶⁶ Hubungan ekonomi dan perdagangan Cina-AS tertuang dalam perjanjian perdagangan yang komprehensif mengikat kedua pihak secara konstruktif mencerminkan liberalisasi hubungan Cina-AS.⁶⁷ Salah satu contoh kesepakatan transaksi hubungan kerjasama ekonomi perdagangan Cina-AS, Cina mengecualikan industri baja atau kimianya dari pengendalian emisi gas rumah kaca atau memberikan subsidi besar pada industri tersebut, sehingga berakibat industri saingannya di AS berada dalam posisi tidak menguntungkan.

⁶⁵ Aa Kustia Sukarnaprawira, *op.cit.*, h. 201-203.

⁶⁶ Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral - Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi Keuangan dan Pembangunan - Departemen Luar Negeri, *Sekilas WTO (World Trade Organization)*, edisi kedua, 2003, h. 1.

⁶⁷ Bagus Dharmawan, *Cermin dari China*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2006, h. 199.

Hal ini karena ketentuan yang dibuat oleh WTO membuat AS relatif tidak punya kuasa untuk mengenakan tarif efektif terhadap produk-produk impor Cina. WTO hanya mengizinkan batasan perdagangan, yakni “penghematan sumber daya alam yang tidak terbarukan”. Berbagai peraturan mengenai tindakan perdagangan sebagai tanggapan terhadap berbagai kebijakan lingkungan sama sekali tidak membawa dampak. Oleh karena itu, saat ini dunia yang dipenuhi oleh berbagai pasar global yang dominan jika dikendalikan oleh sentimen psikologi, maka sedikit saja riak ekonomi proteksionis atau perang kendali ekonomi antar negara bisa menghasilkan berbagai konsekuensi yang berbahaya.⁶⁸ Untuk hal tersebut, maka dalam peraturan-peraturan WTO ditegaskan prinsip-prinsip tertentu tetapi tetap memperbolehkan adanya pengecualian-kecualian, termasuk pemberian subsidi dan tindakan-tindakan imbalan untuk menyeimbangkan subsidi (*countervailing measures*).⁶⁹

Cina sendiri masuk menjadi anggota WTO pada tanggal 11 Desember 2001⁷⁰ setelah melalui negosiasi yang panjang dalam sejarah WTO. Cina menjadi anggota yang ke-143 dalam WTO.⁷¹ WTO merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang telah disepakati oleh negara-negara anggotanya. Persetujuan tersebut merupakan kontrak antar negara anggota yang mengikat pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan perdagangannya. Sesuai dengan strukturnya, WTO memiliki beberapa tujuan penting. *Pertama*, mendorong arus perdagangan antar negara, dengan mengurangi dan menghapus berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran arus perdagangan barang dan jasa. *Kedua*, memfasilitasi perundingan dengan menyediakan forum negosiasi yang lebih permanen. Tujuan penting lainnya adalah untuk penyelesaian sengketa, mengingat hubungan dagang sering menimbulkan konflik-konflik kepentingan.

⁶⁸ David M. Smick, *Kiamat Ekonomi Global*, Jakarta: Daras Books, 2009, h. 44.

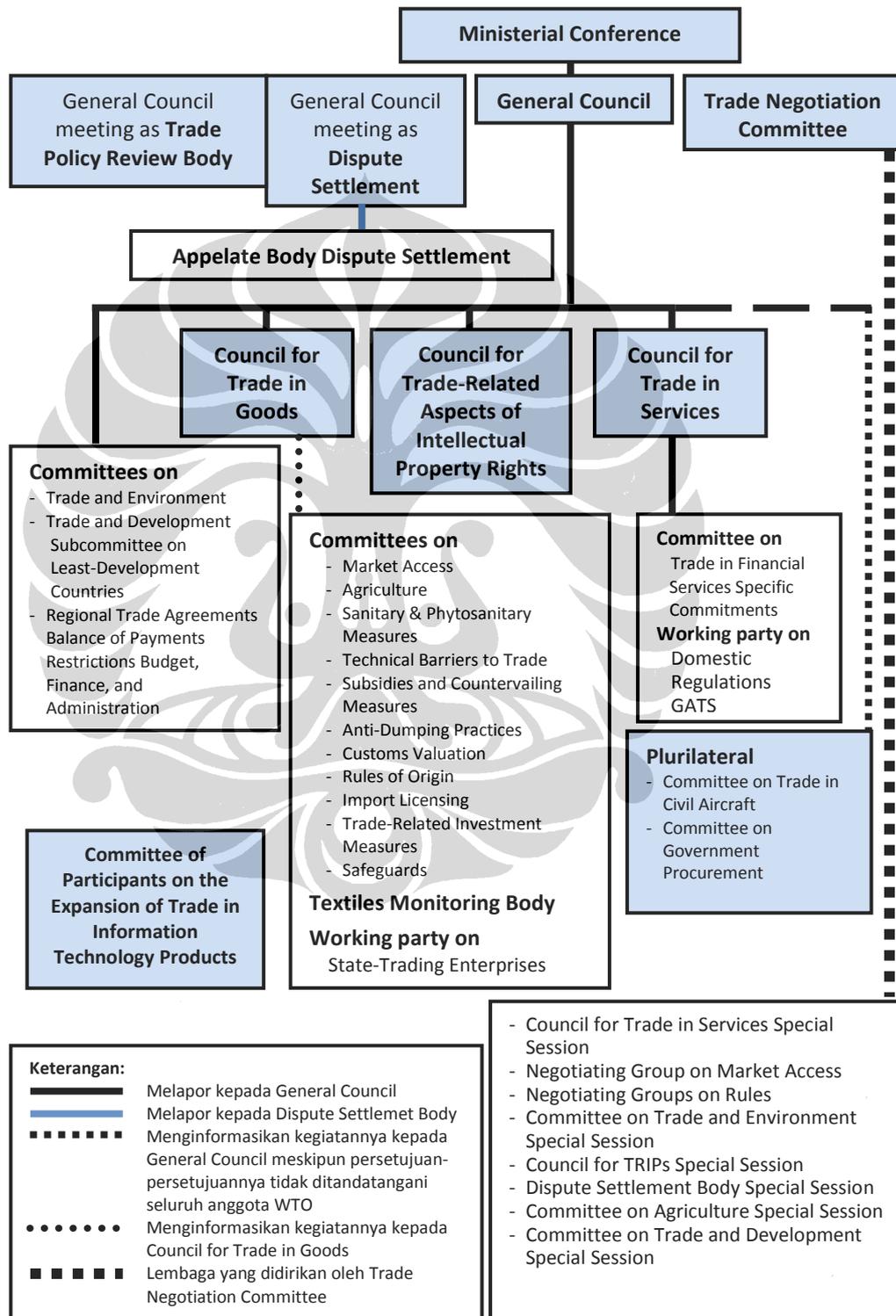
⁶⁹ Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral - Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi Keuangan dan Pembangunan - Departemen Luar Negeri, *op.cit.*, h. 32.

⁷⁰ Kent Hughes, *China and the WTO – Domestic Challenges and International Pressures*, Washington, D.C.: Woodrow Wilson International Center for Scholars, 2002, <http://www.wilsoncenter.org/topics/pubs/WTOOrpt.pdf>, diakses pada tanggal 18 Juli 2009, h. 1.

⁷¹ Sharon K. Hom, *China and the WTO: Year One*, China Rights Forum, No. 1, 2003, <http://www.hrichina.org/public/PDFs/CRF.1.2003/SharonHom1.2003.pdf>, diakses pada tanggal 18 Juli 2009, h. 1.

Adapun struktur organisasi WTO (pasca Konferensi Tingkat Menteri Doha) selengkapnya seperti tabel di bawah ini.

Tabel 1
Struktur Organisasi WTO



Meskipun persetujuan-persetujuan dalam WTO telah disepakati anggotanya, perbedaan interpretasi dan pelanggaran masih dimungkinkan terjadi, sehingga diperlukan prosedur legal penyelesaian sengketa yang netral dan telah disepakati bersama. Dengan adanya aturan-aturan WTO yang berlaku sama bagi semua anggota, maka baik individu, perusahaan, atau pemerintah akan mendapatkan kepastian yang lebih besar mengenai kebijakan perdagangan suatu negara. Terikatnya suatu negara dengan aturan-aturan WTO akan memperkecil kemungkinan terjadinya perubahan-perubahan secara mendadak dalam kebijakan perdagangan suatu negara. Keberhasilan dari pelaksanaan atau implementasi persetujuan-persetujuan dalam WTO tergantung pada dukungan negara-negara anggotanya.⁷²

Legitimasi WTO sebagai sebuah organisasi tergantung pada kemauan anggota-anggotanya untuk mematuhi persetujuan-persetujuan yang telah disepakati bersama. Adapun fungsi utama WTO adalah untuk memberikan kerangka kelembagaan bagi hubungan perdagangan antara negara-negara anggota dalam implementasi perjanjian-perjanjian dan dihubungkan dengan instrumen-instrumen hukum, termasuk dalam *Annex Perjanjian WTO*. Secara khusus, berdasarkan Pasal III Perjanjian WTO ditegaskan 5 fungsi WTO.

Fungsi pertama adalah untuk memfasilitasi implementasi, administrasi dan pelaksanaan dari Perjanjian WTO serta perjanjian-perjanjian multilateral dan plurilateral tambahannya. Fungsi kedua adalah untuk memberikan suatu forum tetap guna melakukan perundingan di antara anggota. Perundingan ini tidak saja menyangkut berbagai masalah/isu yang telah tercakup dalam Perjanjian WTO saja, namun juga berbagai masalah/isu yang belum tercakup dalam Perjanjian WTO. Fungsi ketiga adalah sebagai administrasi sistem penyelesaian sengketa WTO. Fungsi keempat adalah sebagai administrasi dan mekanisme tinjauan atas kebijakan perdagangan (*trade policy review mechanism/TPRM*). Fungsi kelima adalah melakukan kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional dan organisasi-organisasi non-pemerintah.⁷³

⁷² Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral - Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi Keuangan dan Pembangunan - Departemen Luar Negeri, *op.cit.*, hal 1.

⁷³ *Loc.cit.*

Setelah Cina resmi menjadi anggota WTO, Cina berharap dapat meningkatkan volume dan kapasitas perdagangannya dengan sesama anggota WTO melalui peningkatan volume ekspor serta masuknya investasi asing maupun teknologi canggih dari negara-negara maju. Secara politis, keanggotaannya dalam organisasi perdagangan dunia tersebut tentu saja akan melengkapi keanggotaan Cina sebagai anggota warga dunia setelah lama sebelumnya menjadi anggota PBB, Bank Dunia, IMF, *Asian Development Bank* (ADB), maupun APEC. Hal tersebut sekaligus mengangkat legitimasi Cina pada forum-forum internasional, terutama dalam rangka ‘menyingkirkan’ Taiwan dari forum-forum internasional sebagai prakondisi menuju reunifikasi. Selain itu, dengan keanggotaan Cina dalam WTO diharapkan mampu memberikan pengaruh yang konstruktif dalam rangka pengaturan lalu-lintas perdagangan internasional sesuai dengan kepentingan bersama.

Bagi Cina sendiri, keberadaan dalam WTO berarti memberdayakan kembali sumber daya manusia, baik di sektor pemerintahan, bisnis, maupun pertanian menjadi lebih kompeten. Masuknya barang-barang dari luar negeri awalnya menggoyahkan pola pikir dalam gaya hidup, nilai-nilai, dan lebih memberi arti pada kepemilikan uang (*money ownership*). Akan tetapi, dengan tekad untuk tidak jatuh dalam dekadensi, pemerintah Cina dan tokoh-tokoh masyarakat tetap mengerakkan citra dan jati diri yang lebih bermutu dalam era keterbukaan. Ke dalam, bagi Cina dengan keanggotaannya dalam WTO dapat menurunkan bea masuk dan juga hambatan non-tarif, yang tidak sejalan dengan aturan WTO. Dalam jangka pendek diharapkan keanggotaan Cina dalam WTO akan berdampak secara signifikan atas impor Cina, meskipun ekspor Cina ke luar tidak akan naik karena bea masuk mitra dagang Cina sudah terhitung rendah. Sebaliknya, akan terjadi persaingan ketat dalam pasaran domestik Cina antara produk buatan dalam negeri dan impor dengan akibat produsen yang tidak mampu bersaing akan terdesak ke belakang. Dalam industri otomobil, penurunan bea masuk akan menghadapkan industri dalam negerinya dapat meningkatkan impor suku cadang yang lebih bersaing.⁷⁴

⁷⁴ Gregory C. Chow, *The Impact of Joining WTO on China's Economic, Legal, and Political Institution*, Princeton: Princeton University, 2001, <http://www.princeton.edu/~gchow/WTO.pdf>, diakses pada tanggal 18 Juli 2009, h. 2-4.

Keanggotaan Cina dalam organisasi WTO berarti bahwa Cina menjadi terikat untuk melakukan reformasi sesuai dengan peranannya dalam masyarakat internasional, yaitu mulai dari perbaikan jangkauan pasar (penurunan bea masuk atas produk-produk manufaktur dari luar negeri, liberalisasi distribusi, dan lain sebagainya) sampai dengan penerapan hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights*) demi peningkatan daya saing Cina.⁷⁵ Beragam kritik dan protes terhadap globalisasi justru mulai selama pertemuan-pertemuan WTO di Seattle, Washington, karena WTO dicap sebagai simbol ketidaksetaraan global yang mencolok dan hipokrisi negara-negara maju, terutama AS. Realita mengenai globalisasi tersebut diungkapkan oleh Joseph E. Stiglitz dalam bukunya yang berjudul “*Globalization and its Discontents*” (2002).⁷⁶

Dalam bukunya tersebut, Stiglitz ikut serta memberikan kritik akan adanya pemaksaan yang dilakukan oleh AS terhadap negara-negara berkembang untuk membuka pasar produk-produk mereka, sementara AS sendiri menutup pasarnya atas masuknya produk-produk tekstil dan pertanian dari negara-negara berkembang ke AS. Selain itu, AS menyerukan kepada negara-negara berkembang agar tidak memberi subsidi kepada industrinya, namun sebaliknya justru AS sendiri yang mengucurkan subsidi yang berjumlah miliaran dolar kepada para petani di AS untuk menghambat persaingan dari negara-negara berkembang.

Ketidakadilan yang sengaja dipertahankan AS adalah dalam sektor jasa, apalagi kalau AS melihat jasa konstruksi dan maritim negara berkembang lebih kompetitif dibandingkan dengan AS. Bagi Cina, dengan menyadari banyak ketidaksetaraan dalam WTO, berarti Cina harus ikut berupaya melakukan reformasi WTO. Memang untuk itu diperlukan pemikiran jauh ke depan yang mampu membangun suatu agenda perdagangan yang lebih seimbang (*more balanced trade agenda*). Ini berarti tidak perlu menunggu sampai adanya putaran baru dari negosiasi-negosiasi perdagangan yang bertujuan menciptakan kesetaraan.⁷⁷

⁷⁵ Bob Widyahartono, *op.cit.*, h. 100.

⁷⁶ Joseph Stiglitz, “Globalization and Its Discontent”, London: Penguin Book, 2002, dalam buku Bob Widyahartono, *loc.cit.*

⁷⁷ Bob Widyahartono, *op.cit.*, h. 102.

Sementara itu, Noreena Hertz dalam “*The Silent Take-over: Global Capitalism and the Death of Democracy*” (2001)⁷⁸ secara tajam membahas agar komunitas dunia tidak mencampurkan demokrasi dengan kapitalisme (*confusing democracy with capitalism*). Dalam kasus Cina, sudah sejak Bill Clinton, AS secara halus mengungkapkan bahwa meluasnya kapitalisme (pasar bebas) adalah lebih penting daripada demokrasi. Sesungguhnya misi diplomasi AS, baik secara halus maupun terang-terangan (eksplisit), adalah meng’ekspor’ nilai-nilai Barat, termasuk demokrasi sejauh melayani kepentingan AS. Hampir semua negara kapitalisme Barat memiliki tendensi demikian. Persaingan dalam hal kepentingan ekonomi tampaknya menggeser perbedaan ideologi dan ini makin nyata dalam politik dunia. Yang menjadi pertanyaan, khususnya dalam forum WTO, adalah kepentingan siapa yang harus dibela, perusahaan atau negara. Secara lebih eksplisit, pertanyaan yang muncul adalah *World Trade Organization* atau *Whose Trade Organization*.⁷⁹

Dominasi korporasi raksasa justru yang menjadi realita hingga negara-negara tunduk pada kepentingan korporasi-korporasi model Barat, khususnya AS. Dengan menyadari banyak tingkah laku korporasi besar yang mendominasi WTO pasti menjadi referensi Cina sebagai anggota baru untuk bersama-sama negara-negara berkembang lainnya dan mudah-mudahan Jepang juga mengambil prakarsa untuk restrukturisasi WTO. Selama ini memang kepentingan masing-masing negara masih menonjol dalam konteks perundingan dalam WTO. Bagi Cina dan negara-negara anggota WTO lainnya tidak mudah menyamakan pandangan di antara 146 anggota yang ada di WTO. Semua negara cenderung mempertahankan kepentingan dalam negerinya dan terus menyerang pihak lain pada sisi yang menguntungkan, karena adanya perbedaan visi yang cukup menguntungkan. Karena adanya perbedaan visi yang cukup tajam soal liberalisasi perdagangan, terutama di sektor pertanian dan jasa, maka sampai sekarang ini WTO belum banyak berkitik selain membentuk berbagai divisi, yaitu badan banding, divisi penilai, dan divisi legal yang mengatasi perselisihan.

⁷⁸ Noreena Hertz, *The Silent Take Over: Global Capitalism and The Death of Democracy*, http://www.thirdworldtraveler.com/Global_Economy/Silent_Takeover.html, diakses pada tanggal 12 September 2007.

⁷⁹ Bob Widayartono, *op.cit.*, h. 103.

Bagi Cina, masuk ke dalam WTO tetap memiliki untung dan ruginya. Hal ini disadari penuh oleh kepemimpinan Jiang Zemin dan Zhu Rongji ketika dengan gigih berusaha menjadi anggota WTO dan akhirnya resmi efektif menjadi anggota WTO sejak Januari 2002. Tentang keanggotaan Cina dalam WTO terdapat sikap pesimis dari Gordon G. Chang dalam “*The Coming Collapse of China*” (2001), yang mencemaskan bahwa masuknya Cina ke dalam WTO akan melibatkan biaya yang sangat besar. Ia juga menyatakan bahwa masuknya Cina ke dalam WTO akan mengarah pada kehancuran ekonomi Cina. Suatu sikap yang tidak masuk akal mengingat manajemen ekonomi makro Cina menurut pengamat lainnya yang nadanya optimis menunjukkan *record* yang berbeda dengan Gordon G. Chang.⁸⁰ Sehubungan dengan hal tersebut, Jeffrey D. Sachs dan Wing Thye Woo dalam “*China’s Economic Growth After WTO membership*” (Januari 2003) justru menunjukkan suatu titik peralihan dalam kemajuan ekonomi (*watershed on many fronts in China’s economy*).⁸¹

Keanggotaan dalam WTO juga menandakan peralihan dalam pengakuan publik Cina tentang sumber utama pertumbuhan yang mengesankan dalam dua dasawarsa terakhir ini. Kehendak Cina menjadi anggota WTO mencerminkan suatu sikap yang matang dan lebih bertahan diri atas *economic black mail* AS. Masuknya Cina dalam WTO jelas mencerminkan realisasi Cina dalam sikap mendekati negara-negara tetangganya di kawasan Asia Timur dan pula integrasi yang makin mantap dalam ekonomi dunia melalui perdagangan dan lalu lintas uang.⁸² Sikap Cina yang patut diacungi jempol adalah sikapnya ketika dalam konferensi WTO tanggal 10-14 September 2003 di Cancun, Meksiko. Sebagai anggota baru, Cina menyatukan diri dengan negara-negara Dunia Ketiga, bersama Brasil dan Indonesia, mensponsori Kelompok 21 yang menuntut penghapusan subsidi produk pertanian AS dan beberapa negara Uni-Eropa. Keberpihakan pada negara-negara Dunia Ketiga bukanlah politis melulu sifatnya, tetapi benar-benar memperjuangkan taraf hidup bangsa Dunia Ketiga yang bertekad melaju dalam kesejahteraan.

⁸⁰ *Ibid*, h. 104.

⁸¹ Jeffrey D. Sachs & Wing Thye Woo, *China’s Economic Growth After WTO Membership*, Journal of Chinese Economic and Business Studies, Routledge, http://www.earthinstitute.columbia.edu/sitefiles/file/china_cbb03.pdf, diakses pada tanggal 12 Agustus 2009, h. 25.

⁸² Bob Widayartono, *op.cit.*, h. 105.

Keberadaan Cina sebagai anggota WTO makin diharapkan menjadi juru bicara dalam memperjuangkan negara-negara yang terhitung berkembang. Suatu proses yang perlu dukungan Asia Timur adalah menghadapi tekanan-tekanan Barat, khususnya AS.⁸³ Cina pada dasarnya membutuhkan WTO dalam hubungan dagang dengan AS maupun Uni-Eropa. Negara-negara maju, terutama AS, tentulah berharap bahwa Cina akan lebih condong kepada mereka daripada negara-negara sedang berkembang; tetapi di Cancun, hal yang terjadi adalah sebaliknya. AS lantang mengkritik Cina. Sebuah laporan yang dikeluarkan oleh *U.S. Chamber of Commerce* menyebutkan bahwa Cina tidak patuh kepada WTO (*uneven and incomplete*). Ada lima hal pokok yang dicatat oleh majalah itu tentang Cina: (1) pembajakan hak kekayaan intelektual, (2) tidak adanya distribusi bebas barang-barang impor, (3) *non-tariff barrier* pada pertanian, (4) tidak adanya transparansi dalam pembuatan peraturan, (5) tingginya syarat kapitalisasi bagi bank asing maupun perusahaan asuransi serta penyedia pelayanan telekomunikasi. Cina tentu tidak akan terburu-buru ‘taat’ kepada tekanan AS atau negara manapun.

Apabila melihat praktik pelanggaran WTO oleh negara-negara Barat, terutama di bidang *non-tariff barrier* dan subsidi pertanian, Cina pasti mampu berkilah. Dengan demikian, Cina, yang ekonominya makin besar, bukan tidak mungkin akan mampu mempengaruhi pembuatan pasal-pasal peraturan dalam WTO. Hal tersebut karena semua keputusan WTO harus diambil dengan suara bulat (konsensus). Cina dianggap sebagai satu-satunya negara berkembang yang mempunyai kekuatan berarti untuk menantang peraturan yang tidak adil yang disponsori oleh negara-negara maju. Kalau ini terjadi, maka negara-negara berkembang yang selalu dirugikan oleh peraturan-peraturan WTO patut mendukung apa yang dilakukan oleh Cina untuk memajukan perekonomiannya.⁸⁴ Keseriusan Cina untuk melakukan kerjasama dengan AS dalam perdagangan global nampak dalam kesepakatan aksesinya di WTO. Cina telah membuat komitmen akses pasar yang substansial mencakup sektor-sektor pertanian, industri, dan jasa sebagai berikut.

⁸³ *Loc.cit.*

⁸⁴ Ignatius Wibowo, *Belajar dari Cina*, Jakarta: Kompas, 2004, h. 100.

Pertama, penghapusan hambatan non-tarif terhadap impor, persyaratan perizinan impor, dan semua kuota dihapus dalam 5 tahun. *Kedua*, penurunan tarif menjadi 11 persen pada tahun 2003, dan akan terus diturunkan menjadi 8,9 persen pada tahun 2005, sedangkan tarif produk pertanian menjadi 15 persen pada tahun 2004. Pajak impor pada sebagian produk informasi teknologi juga akan dihapuskan. *Ketiga*, kesepakatan WTO pada *Trade Investment Measures* (TRIMs) akan diterapkan dan persyaratan seperti kandungan lokal, kinerja ekspor akan diperlonggar atau dihapus. *Keempat*, Cina menyetujui untuk memberikan hak dagang kepada perusahaan-perusahaan asing yang akan segera diberlakukan dalam tiga tahun. Hambatan/pembatasan kuantitatif dan geografis dalam bisnis retail akan dihilangkan. *Kelima*, Cina menyetujui untuk mengurangi pembatasan investasi asing langsung dalam berbagai industri jasa penting, termasuk jasa distribusi, telekomunikasi, dan keuangan. Untuk jasa pertambahan nilai dalam telekomunikasi, mitra asing akan dapat memiliki saham hingga mencapai 50 persen tanpa batasan geografis dalam jangka waktu 2 tahun setelah akses. Bank-bank asing diperbolehkan untuk menggunakan mata uang lokal dalam menjalankan usahanya dengan perusahaan-perusahaan Cina. *Keenam*, pada tahun 2003, Cina telah menurunkan tarif rata-rata produk pertanian menjadi 16,8 persen, jauh di bawah tarif rata-rata produk pertanian dunia sebesar 62 persen. *Ketujuh*, kebijakan-kebijakan non-tarif pada produk pertanian juga telah dihapuskan. *Kedelapan*, pemerintah Cina membolehkan bank-bank asing beroperasi di Cina untuk memberikan pelayanan jasa dalam mata uang renminbi terhadap perusahaan-perusahaan lokal. *Kesembilan*, pemerintah Cina juga telah melakukan amandemen, perubahan terhadap 14 set hukum, 37 set peraturan administratif, 1000 lebih peraturan departemental yang berhubungan dengan perdagangan jasa. *Kesepuluh*, pemerintah Cina juga sudah melakukan perubahan terhadap peraturan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual guna memenuhi persyaratan perjanjian *Trade Related Intellectual Property Rights* (TRIPs). *Kesebelas*, dalam hal keanggotaan WTO, Cina telah mengajukan permohonan dibentuknya tim investigasi dalam kasus perselisihan dagang sektor baja dengan AS.⁸⁵

⁸⁵ Kedutaan Besar Republik Indonesia Beijing, *Laporan KBRI Beijing Tahun 2003 (Buku II Operasional)*, Beijing, 2004, h. 82.

Permohonan tersebut adalah tuntutan Cina yang pertama sejak aksesinya ke dalam WTO. Dengan masuknya Cina ke dalam WTO, potensi kerjasama ekonomi Cina dalam perdagangan dengan negara-negara lain, khususnya negara mitra dagang terbesarnya, yakni AS, maka potensi kerjasama ekonomi antara Cina dan AS jelas semakin meningkat. Hal tersebut merupakan sebuah kepentingan bersama yang tampaknya menjadi faktor penyeimbang dalam pasang-surutnya hubungan Cina-AS. Dengan demikian, jelas bahwa terlepas dari adanya perbedaan-perbedaan dalam menangani isu-isu penting dan sensitif yang dapat mempengaruhi hubungan kedua negara, Cina dan AS nampaknya akan terus berupaya untuk saling meningkatkan hubungan kedua negara dengan mengenyampingkan perbedaan-perbedaan yang ada, karena kedua negara memiliki banyak kepentingan mendasar yang terlalu berisiko apabila dikorbankan. Kepentingan mendasar yang dimaksud adalah hubungan Cina-AS di bidang ekonomi, karena sejak lama Cina dan AS telah menjadi mitra dagang utama dalam perdagangan dunia.⁸⁶

Penerimaan Cina menjadi anggota WTO pada tanggal 17 September 2001 di tengah kegalauan serangan teroris terhadap gedung WTC di AS telah memulai suatu tahap baru bagi pencatatan keseimbangan dalam perdagangan dan investasi internasional, termasuk pencatatan perdagangan dan investasi dalam hubungan Cina-AS.⁸⁷ Di bidang ekonomi, masuknya Cina ke WTO memberikan akses pasar yang lebih luas di dunia internasional. Untuk sebuah lingkungan manufaktur global yang makin *footloose*, hal ini berarti pembukaan kesempatan baru yang lebih luas bagi ekspansi produk-produk Cina yang didasarkan pada biaya buruh murah dan nilai mata uang yang relatif rendah.⁸⁸ WTO bagi banyak negara sedang berkembang dirasakan tidak menyediakan 'lapangan permainan yang rata', tetapi Cina berhasil memanfaatkan WTO dengan maksimal karena saat inilah Cina mengirimkan barang-barang hasil produksinya untuk diekspor ke seluruh negara di dunia.⁸⁹

⁸⁶ Kedutaan Besar Republik Indonesia Beijing, *Laporan KBRI Beijing Tahun 2002 (Buku II Operasional)*, Beijing, 2003 h. 131.

⁸⁷ Bob Widayartono, *op.cit.*, h. 87.

⁸⁸ I. Wibowo dan Syamsul Hadi, *op.cit.*, h. 284.

⁸⁹ *Ibid*, h. 9.

Akses Cina ke WTO telah mendorong mesin perdagangan Cina bergerak secara cepat mencatat surplus perdagangan luar negerinya.⁹⁰ Hubungan perdagangan Cina-AS memberikan nilai surplus bagi Cina. Ekspor Cina ke AS mencapai 125 miliar dolar AS pada tahun 2002, sebaliknya ekspor AS ke Cina hanya 19 miliar dolar AS,⁹¹ sehingga memberikan keuntungan bagi Cina sebesar 106 miliar dolar AS, yang kemudian meningkat menjadi sebesar 162 miliar dolar AS pada tahun 2004 dan menjadi 200 miliar dolar AS pada tahun berikutnya.⁹² Berbagai cara dilakukan AS untuk menahan laju pertumbuhan perdagangan dan perekonomian Cina, mulai dari pelarangan ekspor dan menurunkan kuota tekstil sampai mendesak para penguasa di Beijing untuk melakukan devaluasi mata uang Cina karena dianggap sangat menguntungkan eksportnya yang murah.⁹³ Di bidang ekonomi perdagangan, konsumen di AS menjadi pasar utama bagi produk Cina. Hingga menjelang tahun 2008, lebih dari 10 persen barang impor AS berasal dari Cina. Pada tahun tersebut, Cina menyumbang hampir sepertiga dari defisit perdagangan AS. Seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi Cina, keberhasilan AS di bidang ekonomi ternyata makin surut.⁹⁴

Sejalan dengan terjadinya krisis finansial di AS yang berdampak pada krisis finansial global, maka betapapun kuatnya ekonomi Cina, ketergantungannya yang cukup besar kepada pasar AS jelas berpengaruh pada ketahanan ekonomi Cina dalam jangka panjang. Penurunan permintaan yang diakibatkan oleh lesunya ekonomi AS jelas akan berpengaruh negatif terhadap ekonomi Cina. Dalam kaitan ini tidak mengherankan jika Cina cenderung bersikap kooperatif dalam upaya mengatasi krisis finansial global yang berawal dari krisis finansial di AS tersebut.⁹⁵ Seiring perubahan waktu, dimensi-dimensi baru selalu muncul dan memberi warna dalam hubungan Cina-AS. Dalam dunia saat ini ketika proses globalisasi berjalan dengan makin cepat, saling ketergantungan yang makin dalam, dan isu-isu global yang makin mengemuka dan makin nyata, hubungan antar negara tidak lagi didasarkan kepada rumusan *zero-sum game*.

⁹⁰ Bagus Dharmawan, *op.cit.*, h. 200.

⁹¹ A. Zaenurrofik, *China – Naga Raksasa-Rahasia Sukses China Menguasai Dunia*, Yogyakarta: Garasi, 2008, h. 160.

⁹² Bagus Dharmawan, *op.cit.*, h. 200.

⁹³ *Ibid*, h. 195.

⁹⁴ I. Wibowo dan Syamsul Hadi, *op.cit.*, h. 285.

⁹⁵ *Ibid*, h. 285.

Hubungan kerjasama yang harmonis akan dapat memberi manfaat, sedangkan pertentangan atau konflik tidak akan pernah menguntungkan siapapun.⁹⁶ Cina dan AS merupakan kedua negara yang saling membutuhkan satu sama lain. Dengan semakin meluasnya globalisasi, tentu saja satu pihak tidak dapat mengabaikan pihak lain.⁹⁷ Dinamika ekonomi Cina saat ini menjadi bergantung pada kondisi dan kebijakan moneter maupun fiskal di AS.⁹⁸ Apabila perekonomian AS mengalami kemerosotan, maka pertama kali yang akan dikorbankan adalah perdagangan dengan Cina. Pembatasan ekspor dari Cina akan memicu perlambatan pertumbuhan ekonomi di negeri Tirai Bambu ini.⁹⁹ Sementara itu, di bidang militer, AS akan tetap merupakan kekuatan terbesar, namun di bidang ekonomi dan politik peran AS akan semakin menurun. Dalam dunia pasca AS ini, dunia tidak terbelah dalam kubu-kubu yang bermusuhan seperti halnya di era Perang Dingin, tetapi *interconnected* dan saling tergantung satu sama lain.

Bersama dengan negara-negara lain, Cina akan tetap memperhitungkan posisi atau kedudukan AS. AS akan lebih sulit untuk menempuh jalur unilateral seperti yang diperagakan dalam serangannya ke Irak, sehingga berakibat ekonomi AS terguncang dengan keras karena beban biaya militer yang terus berkelanjutan dan semakin tidak terkontrol.¹⁰⁰ Saling ketergantungan antara ekonomi Cina-AS jelas akan mengecilkan peluang terjadinya konflik bersenjata antara Cina-AS. Cina dan AS saling membutuhkan satu sama lain, terutama di era krisis finansial global. AS membutuhkan Cina yang mempunyai cadangan devisa dalam jumlah yang sangat besar, bahkan yang terbesar di dunia.¹⁰¹ Oleh karena itu, kebangkitan Cina akan lebih baik bagi AS. *Customer* AS akan memperoleh manfaat dari tersedianya barang dan pelayanan murah. Para pemegang saham pada perusahaan-perusahaan transnasional di AS yang berposisi bagus akan menikmati keuntungan.

⁹⁶ Aa Kustia Sukarnaprawira, *op.cit.*, h. 202.

⁹⁷ N. Mark Lam & John L. Graham, *China Now*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008, h. 444.

⁹⁸ David Harvey, *Neoliberalisme dan Restorasi Kelas Kapitalis*, Yogyakarta: Resist Book, 2009, h. 239.

⁹⁹ N. Mark Lam & John L. Graham, *op.cit.*, h. 66.

¹⁰⁰ I. Wibowo dan Syamsul Hadi, *op.cit.*, h. 286.

¹⁰¹ *Ibid*, h. 287.

Demikian juga karyawan-karyawan AS yang bekerja di sektor ekspor yang sukses akan beruntung pula, sebab orang-orang Cina akan membeli lebih banyak barang dan pelayanan bergaya Amerika apabila mereka bertambah kaya dan menaikkan konsumsi mereka.¹⁰² Hubungan yang kompleks dan makin menguat antara ekonomi Cina dan AS adalah baik bagi kedua negara, terutama dalam hubungan ekonomi perdagangan.¹⁰³ Perekonomian AS dan dunia saat ini mau tidak mau terkait dengan perekonomian Cina. Sebagai contoh, meningkatnya harga minyak sebagian diakibatkan oleh meningkatnya permintaan Cina. Pengaruh internasional Cina yang makin besar karena kemajuan ekonominya tidak harus dipandang sebagai perluasan ambisi militer negara tersebut yang mengakibatkan kecurigaan AS. Diplomasi yang terampil dapat menghasilkan banyak hal untuk menghindari konflik. Saling ketergantungan perekonomian Cina dan AS akan menciptakan pendukung yang kuat untuk pikiran yang sehat.¹⁰⁴ Sebaliknya tanpa pembelian barang-barang Cina oleh AS, Cina tak akan mungkin mempertahankan pertumbuhannya. Tanpa kekuatan ganda Cina dan AS yang mengerakkan ekonomi negara lain, dunia juga akan terseok-seok.¹⁰⁵ Saat ini, bankir-bankir bank sentral dunia, terutama dari Cina, semakin menguasai AS, maka jika mereka menarik dukungan kepada AS akan menimbulkan dampak yang merusak bagi ekonomi Cina sendiri, karena AS masih menjadi pasar utama bagi ekspor Cina.¹⁰⁶ Dalam dunia global saat ini, kegiatan perdagangan memainkan peran penting dan masuknya Cina ke WTO dapat menjadi sesuatu yang baik bagi negara anggota lainnya. Dengan persaingan bebas dalam sistem WTO dapat menumbuhkan akarnya di Cina dan bibit-bibit demokrasi juga telah terlihat di Cina. Perdagangan bebas merupakan pupuk penyuburnya.¹⁰⁷ Dengan demikian, AS dapat membuat kebijakan-kebijakan yang tidak didasarkan pada ketakutan terhadap Cina, namun didasarkan pada kesadaran bahwa perdagangan bebas dalam kerangka WTO akan menjaga Cina tetap bertahan pada jalur perdamaian dan kemakmuran global.

¹⁰² Pete Engardio, *Chindia – Strategi China dan India Menguasai Bisnis Global*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007, h. 437.

¹⁰³ *Ibid*, 436.

¹⁰⁴ Ted C. Fishman, *op.cit.*, h. 394.

¹⁰⁵ *Ibid*, h. 324.

¹⁰⁶ David Harvey, *op.cit.*, h. 324.

¹⁰⁷ N. Mark Lam & John L. Graham, *op.cit.*, h. 440.

AS harus melihat Cina sebagai sebuah kesempatan ketimbang ancaman. Cara pandang demikian akan memberi dampak yang lebih menguntungkan bagi warga kedua negara.¹⁰⁸ Keanggotaan Cina dalam WTO mengikat Cina untuk melakukan reformasi kelembagaan searah dengan aturan internasional dalam berbagai bidang mulai dari akses pasar, penurunan bea masuk atas barang-barang manufaktur, liberalisasi saluran distribusi, dan lain-lain kebijakan. Keanggotaan Cina dalam WTO akan menghasilkan penurunan bea masuk dan penghapusan *non-tariff barriers* yang bertentangan dengan aturan WTO.¹⁰⁹

Dengan masuknya Cina dalam WTO akan terus menggelindingkan reformasi ekonomi di Cina yang membuahakan perusahaan-perusahaan yang memiliki daya saing internasional dan dalam jangka panjang akan meningkatkan ekspor Cina secara lebih signifikan. Hal yang tidak dapat dihindari jika di Cina akan terjadi persaingan yang tajam antara produk dalam negeri dengan produk impor. Dengan demikian, persaingan antara perusahaan asing dengan perusahaan domestik akan terjadi. Keadaan demikian menuntut industri Cina menjadi lebih kompetitif.¹¹⁰

Sejak masuknya Cina ke dalam WTO, keberadaan Cina dalam badan-badan multilateral atau internasional menjadi semakin lengkap. Keanggotaan dalam WTO memecahkan masalah *normal trading relations* dengan AS yang berarti menyingkirkan hambatan-hambatan yang telah lama terjadi dalam hubungan antara kedua negara. Sebaliknya, keberadaan Cina dalam WTO memungkinkan negara tersebut untuk berperan dalam pembuatan peraturan perdagangan dunia, karena Cina menyadari bahwa pengaturan dalam WTO sendiri tidak sepenuhnya adil. Karena itu, Cina berharap dapat menyusun kembali beberapa aturan mainnya. Andai kata Cina berada di luar WTO, Cina tidak akan mampu berbuat banyak dalam meluruskan aturan main WTO. Bagaimana mungkin WTO dengan kata *world* bisa tetap eksis tanpa Cina.¹¹¹ Beragam kritik dan protes terhadap perdagangan bebas justru dimulai selama pertemuan-pertemuan WTO di Seattle, Washington.

¹⁰⁸ *Ibid*, h. 444.

¹⁰⁹ Bob Widyahartono, *op.cit.*, h. 92.

¹¹⁰ *Ibid*, h. 93.

¹¹¹ *Ibid*, h. 97-98.

AS yang menggelorakan agar negara-negara berkembang tidak memberi subsidi pada industrinya, namun justru AS sendiri yang mengucurkan miliaran dolar subsidi pada petani AS untuk menghambat persaingan dari negara-negara berkembang. AS mensubsidi industri domestiknya yang terancam oleh produk impor dari luar. Cina menyadari banyak ketidaksetaraan terjadi dalam WTO dan ikut berupaya melakukan reformasi WTO.¹¹² Sikap Cina yang patut diacungi jempol adalah sikapnya ketika berlangsung konferensi WTO pada tanggal 10-14 September 2003 di Cancun, Meksiko. Sebagai anggota baru, Cina menyatukan diri dengan negara-negara Dunia Ketiga, bersama Brazil dan Indonesia, mensponsori “Kelompok 21”, yang menuntut penghapusan subsidi produk pertanian AS dan beberapa negara Uni-Eropa. Keberpihakan pada negara-negara Dunia Ketiga bukanlah selalu bersifat politis, tetapi benar-benar memperjuangkan taraf hidup bangsa Dunia Ketiga yang bertekad melaju dalam kesejahteraan. Keberadaan Cina sebagai anggota WTO makin diharapkan menjadi juru bicara dalam memperjuangkan negara-negara berkembang. Suatu proses yang perlu dukungan Asia Timur adalah menghadapi tekanan-tekanan Barat, khususnya AS.¹¹³

Ada beberapa hal positif dari hubungan perdagangan Cina-AS dalam kerangka WTO. *Pertama*, WTO memiliki prinsip utama menjamin tindakan-tindakan non-diskriminasi antara negara-negara anggotanya. Pelaksanaan prinsip ini penting bagi negara-negara yang secara ekonomi lebih kecil. Jika tidak terdapat satu sistem multilateral, negara-negara di dunia harus bernegosiasi satu persatu dengan negara lain. Hal ini tentunya akan memerlukan banyak sekali waktu dan sumber daya. *Kedua*, adanya sistem penyelesaian sengketa WTO juga menempatkan posisi negara kecil sama tingginya dengan *superpower* ekonomi dunia seperti AS. Antigua dan Barbuda dengan penduduk 68.000 orang pada tahun 2003 telah mengajukan AS ke badan penyelesaian sengketa WTO. Jika melalui jalur negosiasi bilateral, negara yang lebih kecil secara ekonomi dan tanpa memiliki posisi tawar yang lebih tinggi tentunya akan mudah mendapat tekanan dari negara besar. *Ketiga*, pembentukan WTO diharapkan meningkatkan arus lalu-lintas barang dan jasa.

¹¹² Bob Widyahartono, *op.cit.*, h. 102-103.

¹¹³ *Ibid*, h. 105.

Pada gilirannya, hal tersebut diharapkan mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, mendorong lebih tingginya pendapatan negara, dan mendorong lebih disiplinnya suatu negara (*good governance*) sehingga tidak mudah mengubah-ubah suatu peraturan yang ditujukan untuk kepentingan sekelompok orang saja (*rent-seeking*). Keempat, selain merupakan perangkat perjanjian internasional yang menjamin non-diskriminasi di antara negara anggotanya, WTO juga menjamin perlakuan yang berbeda atau lebih fleksibel (*special and differential treatment*) bagi negara berkembang. Dengan pengaturan tersebut, negara berkembang diharapkan dapat mengejar ketertinggalannya dari negara-negara yang lebih maju.¹¹⁴ Sementara itu, hubungan kerjasama bilateral Cina-AS selama 5 tahun terakhir menghasilkan lebih dari 60 persen pertumbuhan akumulatif total GDP dunia. Dengan demikian, seluruh sistem global, termasuk AS, semakin terkait dengan sistem politik, perekonomian, dan finansial Cina. Dalam mempertahankan perekonomian baru yang ada sekarang ini, AS perlu bekerjasama dengan Cina dalam sistem internasional secara keseluruhan.¹¹⁵ Beberapa hal yang mendorong negara-negara anggota, termasuk Cina dan AS, melakukan perdagangan dalam kerangka WTO adalah sebagai berikut.

Pertama, mendorong terciptanya perdamaian. Dengan semakin tingginya intensitas perdagangan antar negara, kebutuhan untuk menciptakan kondisi damai akan semakin besar pula. Hal ini sangat penting untuk mendorong arus perdagangan barang dan jasa berjalan lancar.

Kedua, menyelesaikan persengketaan antar negara dengan secara konstruktif. Bersamaan dengan semakin besarnya volume dan jenis produk perdagangan serta semakin banyaknya negara dan perusahaan yang terlibat dalam perdagangan internasional, kemungkinan terjadinya sengketa akan semakin besar pula. Karena WTO mempunyai Badan Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement Body*), sengketa-sengketa dagang yang terjadi sedikit banyak akan dapat diselesaikan secara lebih konstruktif melalui aturan-aturan penyelesaian sengketa dalam WTO yang bersifat mengikat.

¹¹⁴ Emmy Yuhassarie, *Transaksi Perdagangan Internasional*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2006, h. xxv.

¹¹⁵ David M. Smick, *op.cit.*, h. 151.

Ketiga, memudahkan perdagangan antar negara. Walaupun WTO tidak dapat menyatakan bahwa negara-negara dalam hubungan perdagangannya berada dalam posisi yang seimbang, persetujuan-persetujuan WTO dapat mengurangi perbedaan kekuatan dagang tersebut dan memberikan peluang lebih besar kepada negara-negara kecil untuk memperjuangkan kepentingannya. Selain itu, baik negara besar maupun kecil dapat mengurangi kompleksitas negosiasi dagang antar negara dengan menggunakan forum WTO.

Keempat, mendorong pengurangan tarif dan hambatan non-tarif. Harga barang dan jasa untuk konsumen ditentukan oleh kebijakan perdagangan yang diberlakukan. Dengan pengenaan tarif yang tinggi, harga produk tersebut akan semakin mahal. Persetujuan-persetujuan WTO mendorong penerapan aturan-aturan pengurangan tarif dan penghapusan hambatan-hambatan non-tarif yang menghambat perdagangan di negara-negara anggota. Dengan kebijakan perdagangan sesuai dengan persetujuan-persetujuan WTO, konsumen diharapkan akan mendapatkan produk dengan harga yang lebih murah.

Kelima, memberikan banyak pilihan produk dengan kualitas berbeda. Konsumen dapat dengan mudah untuk mendapatkan berbagai produk, baik barang atau jasa dengan berbagai kualitas. Pada saat yang bersamaan, produsen dari dalam negeri juga akan terdorong untuk meningkatkan kualitas produknya dengan harga yang bersaing. Kondisi semacam ini selain menguntungkan konsumen karena banyaknya pilihan juga meningkatkan persaingan usaha yang lebih sehat.

Keenam, meningkatkan pendapatan. Berkurangnya hambatan perdagangan (tarif dan non-tarif) akan meningkatkan tingkat keuntungan dalam perdagangan, dan ini berarti peningkatan pendapatan bagi negara maupun bagi perseorangan. Untuk mendapatkan hal tersebut diperlukan pula perubahan-perubahan aturan yang sesuai dengan persetujuan WTO.

Ketujuh, mendorong pertumbuhan ekonomi. Perdagangan sangat potensial menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dengan pengurangan hambatan perdagangan (tarif dan non-tarif) yang berarti pula meningkatkan keuntungan yang diperoleh, maka semakin besar pula volume usaha yang dijalankan. Sebagai konsekuensi, tingkat kebutuhan tenaga kerja juga semakin besar. Walaupun ini juga tergantung pada tingkat penguasaan teknologi, tingkat impor, dan lain-lain.

Kedelapan, mendorong praktik non-diskriminasi, transparansi, perlakuan yang sama terhadap mitra dagang, dan perlakuan nasional. Penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam peraturan negara-negara anggota akan mendorong terciptanya peraturan perdagangan yang lebih seragam. Hal ini tentu akan lebih memudahkan para pengusaha dalam menjalankan perdagangan internasional karena mereka tidak dipersulit oleh peraturan-peraturan yang berbeda pada setiap negara anggota WTO.

Kesembilan, melindungi negara-negara anggota dari praktik-praktik persaingan dagang yang tidak sehat. Sistem perdagangan WTO dapat memberikan pandangan yang lebih berimbang dalam penilaian terhadap berbagai kebijakan perdagangan. Negara-negara besar tidak lagi dapat menerapkan kebijakan-kebijakan dagang sepihak yang tidak sesuai dengan WTO dan negara-negara kecil tidak lagi mudah ditekan oleh kepentingan sekelompok negara karena adanya persetujuan-persetujuan dalam WTO.

Kesepuluh, mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih. Dalam peraturan WTO, sekali pemerintah membuat komitmen, maka tidak mudah bagi negara tersebut untuk menarik kembali komitmennya. Persetujuan-persetujuan WTO juga melarang penerapan kebijakan-kebijakan yang mendistorsi perdagangan. Bagi para pengusaha, kondisi seperti ini akan mendorong terciptanya kepastian berusaha. Sementara itu, bagi pemerintah, hal ini berarti pula mendisiplinkan pemerintah dan praktik-praktik yang merupakan kepentingan publik serta mendistorsi perdagangan internasional.¹¹⁶

Persetujuan Cina-AS dalam WTO mencakup perdagangan barang, jasa, dan kekayaan intelektual yang mengandung prinsip-prinsip utama liberalisasi. Di dalamnya terdapat berbagai komitmen untuk membuka pasar dan menurunkan tarif dan hambatan perdagangan lainnya secara individual berdasarkan struktur dasar persetujuan WTO, seperti dalam tabel di bawah ini.¹¹⁷

¹¹⁶ Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral - Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi Keuangan dan Pembangunan - Departemen Luar Negeri, *op.cit.*, h. 8.

¹¹⁷ *Ibid*, h. 20.

Tabel 2
Struktur Dasar Persetujuan WTO

	Barang	Jasa	Kepemilikan Intelektual	Sengketa
Prinsip Dasar	GATT	GATS	TRIPs	Penyelesaian Sengketa
Tambahan Secara Rinci	Persetujuan mengenai Barang dan <i>Annex</i>	<i>Annex</i> Bidang Jasa		
Komitmen Akses Pasar	Jadual Komitmen negara-negara anggota	Jadual Komitmen negara-negara anggota (pengecualian terhadap MFN)		

Persetujuan-persetujuan di atas dan *annex*-nya berhubungan antara lain dengan sektor-sektor di bawah ini:

Untuk barang (dalam GATT):

- Pertanian
- *Sanitary and phytosanitary*
- Badan Pemantau Tekstil (*textiles and clothing*)
- Standar produk
- Tindakan investasi yang terkait perdagangan (TRIMs)
- Tindakan *anti-dumping*
- Penilaian pabean (*customs valuation methods*)
- Pemeriksaan sebelum pengapalan (*pre-shipment inspection*)
- Ketentuan asal barang (*rules of origin*)
- Lisensi impor (*imports licensing*)
- Subsidi dan tindakan imbalan (*subsidies and countervailing measures*)
- Tindakan pengamanan (*safeguard*)

Untuk jasa (dalam *annex* GATS):

- Pergerakan tenaga kerja
- Transportasi udara (*air transport*)
- Jasa keuangan (*financial services*)
- Perkapalan (*shipping*), dan
- Telekomunikasi (*telecommunication*).

2.2.2 Institusi Multilateral

Kerjasama multilateral yang melibatkan Cina-AS antara lain nampak ketika ekonomi gelembung (*bubble economy*) perekonomian AS pecah, yang mempengaruhi dan membuat dunia terperangah, menjalar menjadi krisis dan ancaman bagi semua negara. Dalam hal ini, Cina, AS, dan seluruh peserta konferensi tingkat tinggi (KTT) negara-negara anggota kelompok G-20 di Washington pada bulan November 2008 telah menyepakati bersama bahwa krisis finansial yang terjadi diakibatkan oleh permainan berisiko di pasar keuangan AS yang keterlaluhan dan ditambah sikap acuh tidak acuh dari regulator yang seharusnya menjadi wasit. Krisis tersebut menyebabkan tidak berfungsinya pasar ekuitas dan kredit internasional yang menyebabkan kesulitan pendanaan di negara-negara Dunia Kedua dan Dunia Ketiga.¹¹⁸

Memburuknya situasi perekonomian dunia akibat dari krisis finansial tersebut membuat PBB perlu mengambil peran penting dalam penanggulangan krisis. Sekjen PBB, Ban Ki-moon, menegaskan bahwa PBB akan menjadi tuan rumah pembicaraan krisis keuangan yang diusulkan oleh Presiden Perancis, Nicolas Sarkozy, untuk memperkuat perlunya akan suatu perbaikan multilateral. PBB meminta negara maju untuk bekerjasama dalam merekapitalisasi sistem perbankan dan menjamin dana masyarakat di seluruh dunia pada saat krisis finansial.

Menurut Ban Ki-moon, pendekatan yang lebih terkoordinasi sangat diperlukan untuk mengatasi dampak dari kejadian baru-baru ini untuk membangun agenda PBB. Ban Ki-moon mengkritisi cara *ad hoc* yang dilakukan beberapa pemerintah untuk merespon krisis dan mengatakan hal itu mencerminkan kekosongan yang serius dalam sistem keuangan dunia. Untuk memastikan keberlanjutan stabilitas dan melindungi pertumbuhan ekonomi di negara maju dan berkembang, PBB mempertimbangkan lebih jauh dan mereformasi secara mendasar sistem keuangan dunia (*world financial system*) yang lebih baik untuk menghadapi tantangan di abad ke-21. Sarkozy, yang negaranya memegang jabatan presiden bergilir Uni-Eropa, meminta perubahan sistem keuangan global.

¹¹⁸ Muhammad Ma'ruf, *Tsunami Finansial – Peluang Bisnis dan Investasi Indonesia dan Setiap Individu di tahun 2009*, Jakarta, Hikmah, 2009, h. xii.

Ia menegaskan kembali mengenai “pemecahan ambisius dan pragmatis” terhadap kesulitan ekonomi akibat krisis finansial. Ia mengatakan bahwa pembicaraan itu sedikitnya harus mencakup Kelompok Tujuh negara industri maju (G7) dan Rusia, Cina, India, Afrika Selatan, Meksiko, Brazil, dan Mesir untuk berhasil. AS dan Uni-Eropa sendiri telah mengusulkan serangkaian KTT internasional mengenai krisis finansial global. KTT itu perlu dilakukan untuk meninjau kembali kemajuan yang dibuat guna memecahkan krisis saat ini, dan perlu kesepakatan mengenai prinsip-prinsip reformasi untuk menghindari pengulangan dan memastikan kemakmuran di masa depan. Mungkin hanya Cina yang cukup percaya diri dalam menghadapi krisis. Cina merupakan bagian dari optimisme negara Asia yang relatif tidak mengalami guncangan hebat akibat krisis. Perekonomian Asia yang menghadapi krisis keuangan besar pada tahun 1997-1998, kini menikmati pertumbuhan yang tinggi dan membengkaknya cadangan devisa dengan defisit fiskal dan tingkat hutang yang rendah. Kondisi tersebut menyebabkan Asia menjadi tempat menarik saat krisis keuangan dunia.¹¹⁹

2.2.3 Institusi Regional

APEC merupakan forum kerjasama ekonomi regional antar negara-negara di kawasan Asia Pasifik yang dibentuk pada tahun 1989 dan bertujuan untuk memfasilitasi peningkatan perdagangan di kawasan tersebut. Seperti diketahui, Cina dan AS merupakan anggota APEC.¹²⁰ APEC merupakan salah satu forum kerjasama yang merepresentasikan kepentingan negara-negara kawasan Asia Pasifik dalam perdagangannya yang semakin meningkat.¹²¹ Pertemuan informal para pemimpin ekonomi APEC (*APEC Economics Leaders*) dalam KTT APEC ke-14 pada tanggal 18-19 Nopember 2006. KTT APEC ke -14 berlangsung di Hanoi, dengan diikuti oleh 21 negara, termasuk Cina dan AS, yang menghasilkan Deklarasi Hanoi yang berisi 12 kesepakatan untuk kerjasama dalam bidang liberalisasi perdagangan, keamanan, pemberantasan korupsi, energi, dan perubahan iklim.

¹¹⁹ Lili Hermawan, *Keluar dari Krisis Global*, Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2008, h. 75-77.

¹²⁰ Alexander C. Chandra, “APEC: Perspektif Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia”, dalam buku Departemen Luar Negeri dan Centre for Strategic and International Studies, *APEC dan Indonesia di Persimpangan Jalan*, Yogyakarta: Kanisius Media, 2005, h. 57 dan 59.

¹²¹ Robert Gilpin, *APEC in a New International Order*, Washington: University of Washington Vo. 6, No. 5, 1995, h. 7.

Sejumlah persyaratan bagi kerjasama dalam APEC¹²², antara lain meliputi (1) bahwa kerjasama ekonomi Asia Pasifik didasarkan atas prinsip-prinsip persamaan, keadilan, dan kemanfaatan bersama, dengan sepenuhnya memperhatikan perbedaan-perbedaan dalam tingkatan pertumbuhan ekonomi dan sistem sosial dan politik dari para pesertanya, (2) bahwa kerjasama ekonomi Asia Pasifik tidak akan digiring menjadi suatu blok ekonomi atau blok perdagangan tertutup, tetapi sebaliknya memperkuat sistem ekonomi dan perdagangan yang terbuka di dunia, (3) bahwa kerjasama ekonomi Asia Pasifik akan menyediakan diri sebagai suatu forum konsultasi dan pertukaran pikiran mengenai masalah-masalah ekonomi dan tidak akan mengambil keputusan-keputusan yang mengikat bagi peserta, dan (4) bahwa kerjasama ekonomi Asia Pasifik dalam pelaksanaannya akan dikembangkan secara berangsur (*gradual*) dan pragmatis, khususnya dalam aspek institusionalnya.¹²³

APEC, sebagai forum kerjasama regional yang terbuka, tetap berorientasi pada prinsip-prinsip dalam WTO, dengan terlebih dahulu memantapkan arah kerjasama regionalnya. Meskipun APEC merupakan bentuk kerjasama yang sifatnya tidak mengikat, orientasi dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan APEC tetap mendukung WTO, yang mengharuskan kepada negara-negara anggotanya untuk menjaga komitmennya, baik sebagai anggota APEC maupun sebagai anggota WTO.¹²⁴

Adapun prinsip-prinsip yang menjadi landasan fundamental bagi setiap negara anggotanya dalam melakukan kerjasama dalam APEC terdiri dari 8 prinsip, yakni (1) prinsip perdagangan dan investasi bebas, (2) prinsip kerjasama internasional, (3) prinsip solidaritas regional, (4) prinsip manfaat yang sama, (5) prinsip saling menghormati dan egaliterisme, (6) prinsip pragmatisme, (7) prinsip pengambilan keputusan berdasarkan konsensus dan implementasi yang fleksibel, dan (8) prinsip regionalisme terbuka.¹²⁵

¹²² Faustus Andrea, "Diplomasi Tingkat Tinggi Asia Pasifik: KTT ASEAN, KTT APEC, dan KTT ASEM 2006", dalam jurnal Analisis CSIS, *Isu-isu Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Perspektif 2007 dan Proyeksi 2008*, Vol. 37, No. 1, Maret 2008, h. 122.

¹²³ Ali Alatas, "Relevansi APEC", dalam buku Departemen Luar Negeri dan Centre for Strategic and International Studies, *op.cit.*, h. 68.

¹²⁴ Awani Irewati et. al, *Indonesia dan APEC*, Jakarta: Puslitbang Politik dan Kewilayahan – LIPI, 1997, h. 29.

¹²⁵ *Ibid*, h. 33.

2.3 Kerjasama Cina-AS dalam hubungan Bilateral

Forum G-2 antara Cina-AS (G-2) merupakan hubungan bilateral Cina-AS dalam pertemuan/dialog ekonomi yang merupakan tindak lanjut dari pertemuan/dialog antara Paulson-Wu Yi dan Paulson-Wang Qishan. G-2 mempunyai pengaruh signifikan dalam krisis finansial saat ini. Eksistensi G-2 dapat membantu mengurangi ketegangan melalui saluran pada tingkat tinggi, menjaga kesalahpahaman yang mungkin meningkat akibat dari berbagai isyarat-isyarat yang tidak diharapkan (*unintended mixed signals*). G-2 juga membantu mengurangi ketakutan Cina terhadap pasar modal AS.¹²⁶ Eksistensi G-2 juga sangat bermanfaat dalam mengurangi ketegangan akibat insiden-insiden dalam hubungan bilateral antara Cina dan AS, seperti gangguan terhadap kapal angkatan laut AS USNS Impeccable oleh 5 kapal laut Cina di dekat Pulau Hainan. Cina menganggap bahwa kapal AS tersebut telah memasuki perairan teritorial Cina.¹²⁷

Selain bermanfaat dalam mengurangi ketegangan hubungan Cina-AS tersebut, kerjasama Cina-AS dalam G-2 selama 5 tahun terakhir telah menghasilkan lebih dari 60 persen pertumbuhan akumulatif total GDP dunia. Cina dan AS telah bekerjasama secara luas dengan seluruh dunia. Seluruh sistem global semakin terkait dengan sistem politik, perekonomian, dan finansial Cina-AS. Jika AS ingin mempertahankan perekonomian global saat ini, AS perlu bekerjasama dengan Cina pada sistem internasional secara keseluruhan. AS dan Cina membutuhkan upaya yang terkoordinasi untuk mengangkat dunia ke era kemakmuran yang baru.¹²⁸ Hubungan bilateral antara Cina dan AS sempat tegang pada saat Menteri Keuangan AS, Timothy Geithner pada pertengahan bulan Januari 2009 mengatakan bahwa Cina merupakan *currency manipulator*. Hal ini dijawab oleh Perdana Menteri Wen Jiabao dengan penuh semangat pada pertemuan tingkat tinggi para pemimpin dunia di Davos, Swiss, bahwa kebijakan penetapan nilai tukar mata uang dilakukan untuk menjaga Renminbi pada tingkat yang layak dan seimbang (*reasonable and balanced level*).

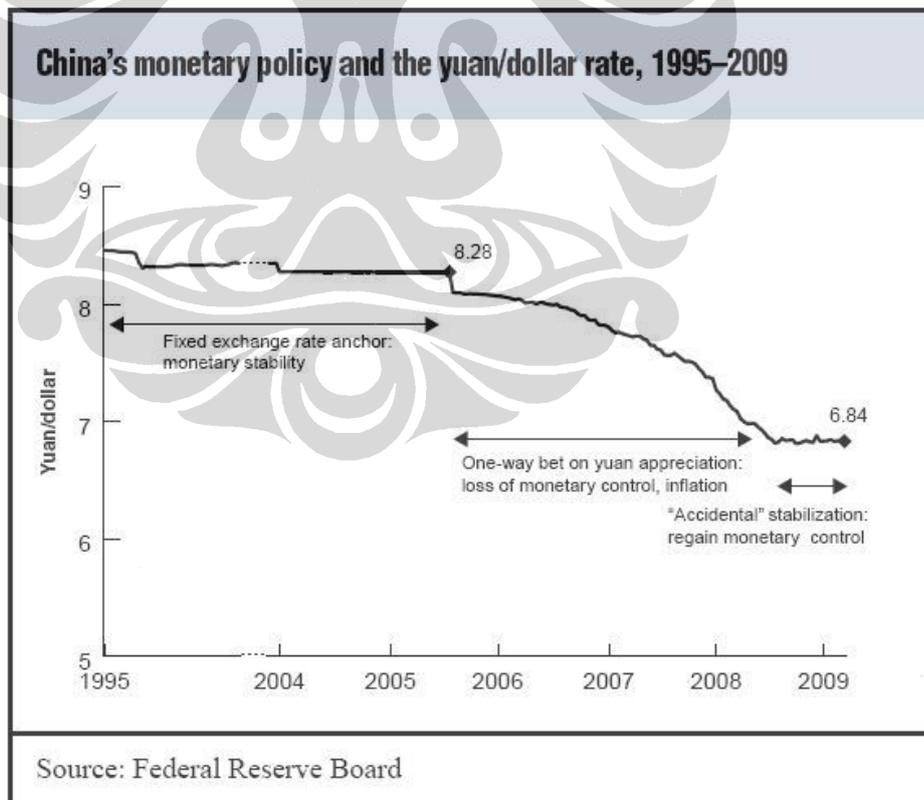
¹²⁶ Zhen Yongnian, *Sino-American Relations: The G20 and the Future G2*, EAI Background Brief No. 449, <http://www.eai.nus.edu.sg/BB449.pdf>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2009, h. i dan ii.

¹²⁷ *Ibid*, h. i dan ii.

¹²⁸ David M. Smick, *op.cit.*, h. 152.

Penetapan nilai tukar mata uang merupakan tindakan ekonomi yang tepat untuk menjaga kestabilan nilai tukar dolar AS dan yuan. *Pertama*, selama nilai tukar tetap yang dilakukan adalah kredibel, sebagaimana pada tahun 1995 dan 2004 pada 8,28 yuan per dolar AS, maka hal tersebut merupakan jangkar keuangan yang efektif (*effective monetary anchor*) bagi Cina. Setelah peningkatan inflasi yang tinggi hingga lebih dari 20 persen pertahun pada tahun 1993-1995, jangkar nilai tukar tetap membantu Cina memperoleh kembali stabilitas tingkat harga. *Kedua*, stimulus fiskal yang besar akan sangat efektif apabila nilai tukar mata uang Cina tetap dalam kondisi stabil sebagaimana telah dilakukan sejak bulan Juli tahun 2008.¹²⁹ Adapun kondisi moneter Cina dengan kebijakan penetapan nilai tukar mata uang Renminbi sebagaimana digambarkan dalam grafik di bawah ini.

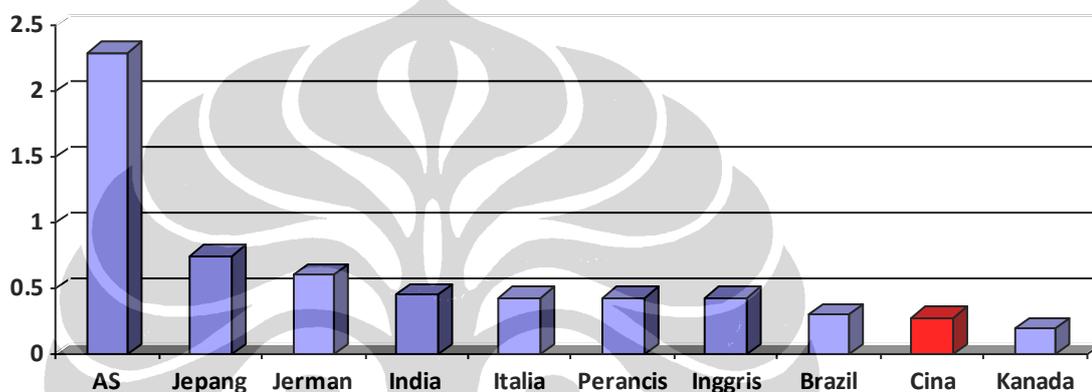
Grafik 2
Kebijakan Moneter Cina dan Nilai Tukar Yuan-Dolar
Periode 1995-2009



¹²⁹ Ronald I. Mc Kinnon, *Solidifying a New G2*, http://www.international-economy.com/TIE_W09_McKinnon.pdf, diakses pada tanggal 23 Agustus 2009, h. 1.

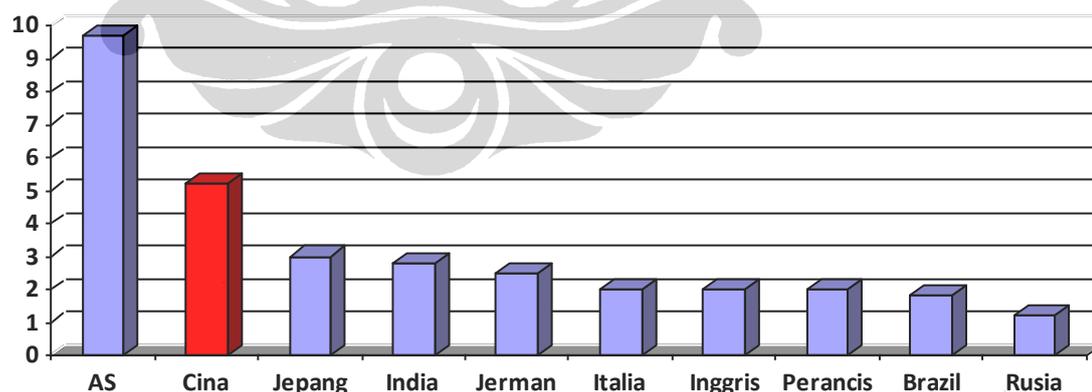
Cina diperkirakan akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar dunia, menggantikan posisi AS pada tahun 2020-2050.¹³⁰ Perkiraan tersebut tidaklah mengherankan apabila melihat perbandingan GDP Cina pada tahun 1978 dengan tahun 2001 yang dikeluarkan oleh *Federal Reserve Bank of Dallas* dalam grafik di bawah ini.¹³¹ Kedudukan perekonomian Cina dibandingkan dengan negara-negara lain dapat digambarkan seperti pada grafik di bawah ini.

Grafik 3
Negara-negara dengan GDP Terbesar di Dunia
pada Tahun 1978



Sumber : *World Development Indicators, World Bank*

Grafik 4
Negara-negara dengan GDP Terbesar di Dunia
pada Tahun 2001



Sumber : *World Development Indicators, World Bank*

¹³⁰ *Ibid*, h. 105.

¹³¹ W. Michael Cox & Jaheong Koo, *China: Awakening Giant*, Dallas: Federal Reserve Bank, 2003, h. 2.

Kesimpulan

Dari uraian yang telah disampaikan pada bab ini, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa hubungan kerjasama Cina-AS, terutama terjadi dalam bidang ekonomi dan perdagangan melalui berbagai institusi internasional, baik dalam tataran global, multilateral, maupun regional, serta melalui kerjasama bilateral kedua negara. Keanggotaan Cina dalam institusi internasional, terutama WTO, berimplikasi kepada pertumbuhan dan kemajuan ekonomi Cina. Kemajuan ekonomi Cina berimplikasi kepada peningkatan kepentingan dalam hubungan timbal-balik antara Cina dan AS. Peningkatan kepentingan timbal-balik Cina-AS pada gilirannya berimplikasi pada peningkatan kerjasama bilateral bagi kedua negara dan mendorong terwujudnya perdamaian.

